

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemandirian desa merupakan keadaan desa yang maju sehingga dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri dan tidak tergantung hanya pada bantuan pemerintah, bantuan pemerintah tersebut hanya sebagai insentif atau dorongan (Wardoyo, 2015). Pemerintah desa dan masyarakat bersama-sama dalam meningkatkan kesejahteraan dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mewujudkan kemandirian desa. Desa mandiri atau yang disebut Desa Sembada merupakan desa maju yang dapat melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa yang sebesar-besarnya dengan cara memiliki ketahanan secara sosial, finansial, dan lingkungan (Leunupun & Aktawlor, 2022).

Kemandirian suatu desa bergantung pada beberapa variabel, misalnya Pendapatan Asli Daerah (PADes). Penatausahaan keuangan desa harus diperkuat termasuk perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa oleh perangkat desa atau kepala desa. Selain itu, BUMDes memainkan peran penting dalam kesejahteraan masyarakat desa dengan menggerakkan produk yang dibuat oleh masyarakat setempat, memberi mereka bantuan keuangan untuk memulai usahanya, atau menyelenggarakan kegiatan pariwisata sebagai bagian dari desa wisata (Mulyani *et al.*, 2021).

Desa yang mandiri secara ekonomi merupakan desa yang dapat membangun dan menata desa dengan memaksimalkan potensi desa yang dimiliki. Artinya, desa mengutamakan kemampuannya sendiri dalam mengatasi

berbagai kendala untuk mencapai satu tujuan tanpa mengesampingkan peluang lain untuk kerjasama yang saling menguntungkan. Desa yang mandiri secara ekonomi merupakan desa yang mampu mengelola potensi lokal desa untuk menghasilkan pendapatan bagi desa (Permatasari & Imaniar, 2022). Potensi lokal desa dimanfaatkan untuk nantinya dikelola sebagaimana mestinya sehingga bisa dijadikan sesuatu yang bernilai ekonomis sehingga bisa menambah pendapatan desa.

Meningkatkan desa mandiri melalui pembangunan dan pemberdayaan bagi masyarakat harus terus diagendakan dan digalakkan secara terus-menerus serta disesuaikan dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Pendampingan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk dilakukan secara berjenjang dan bertahap akan tetapi dalam hal ini tidak lupa pula untuk memperhatikan aspek kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri dapat menjadi agen perubahan untuk kemajuan desa yang berkelanjutan, dari sinilah pemberdayaan masyarakat dapat menghasilkan beberapa sumber daya manusia yang berkelanjutan yang pada akhirnya bisa dijadikan fondasi dalam peningkatan ekonomi serta pembangunan desa berkelanjutan (Maulud & Falatehan, 2022).

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu cara untuk dapat kemudian mengelola potensi lokal desa. Dimana dengan adanya pariwisata akan meningkatkan kesempatan kerja baik dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wisata maupun dalam berbagai sektor usaha yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kepariwisataan. Pariwisata akan mampu mengembangkan dan meningkatkan pengenalan dan kecintaan terhadap tanah air, sehingga dapat menumbuhkan sikap toleransi dalam pergaulan, menjadi

pendorong dalam pembangunan bangsa, selain itu pandangan pribadi tentang makna nilai-nilai kehidupan dapat diperluas dengan berwisata (Wardoyo, 2015).

Menurut Damanik dan Weber (2006) dalam bukunya menerangkan bahwa adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan merupakan salah satu prinsip pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Pemukiman di sekitar area wisata yang ditempati oleh penduduk asli desa sebagai masyarakat lokal di dalam pariwisata memiliki peranan sebagai salah satu pemain kunci, sebab sesungguhnya merekalah yang akan memilih kualitas produk wisata sekaligus menyediakan sebagian besar atraksi. Masyarakat beserta perannya ini sebagai suatu hal yang penting dalam merespon tuntutan dan urgensi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan serta sebagai upaya menjaga keutuhan alam agar tetap lestari.

Desa wisata sebagai salah satu cara pendekatan pengembangan pariwisata untuk mencapai kemandirian desa (Krestanto, 2021). Penyajian kegiatan wisata semakin berkembang dengan tidak lagi hanya mengandalkan sektor pendapatan utama secara murni sehingga memungkinkan pengembangan wilayah perdesaan. *Community-based tourism* merupakan suatu istilah lain yang digunakan dalam membentuk suatu program yang bernama Pariwisata Inti Rakyat (PIR) oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata atas dasar peristiwa tersebut. Desa Wisata yakni suatu tempat pedesaan yang menawarkan keseluruhan komponen kepariwisataan, seperti: kuliner berupa makanan minuman, atraksi, akomodasi, dan kebutuhan wisata lainnya, aktivitas perekonomian yang unik, menarik dan mempunyai potensi untuk dikembangkan, serta suasana keaslian pedesaan baik berasal dari struktur tata ruang desa yang khas, adat istiadat, keseharian, kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, dan

juga mempunyai arsitektur bangunan asli daerah tersebut di dalam program Pariwisata Inti Rakyat.

Menurut Ma'ruf (2020) di dalam analisis penelitiannya, desa wisata merupakan program daerah di tingkat kabupaten yang banyak mengadaptasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada salah satu program nasional yang digaungkan. Masyarakat sejatinya dapat mengembangkan dan berkontribusi dalam pemanfaatan keunikan serta ciri khas desa sebagai suatu atraksi desa wisata. Kehidupan masyarakat desa akan banyak berubah membentuk suatu pola kehidupan baru dengan membangun desa wisata yang hanya tidak sekedar membangun suatu destinasi saja dan atraksi semata (Suryaningsih *et al.*, 2020). Tantangannya yaitu bagaimana cara agar tidak merusak kebiasaan masyarakat desa pada umumnya dan kearifan lokal serta tanpa mengganggu struktur masyarakat akibat dari membangun suatu destinasi.

Kemudian penelitian oleh Krestanto (2021) mengatakan bahwa sebuah desa wisata yang berpusat pada alam, produk dan budaya bisa dikembangkan membentuk desa yang dikemas melalui wisata. Desa wisata bukan hanya desa yang memiliki wisata alam sebagai destinasi daerah tujuan wisata saja tetapi desa yang dapat ditunjang dengan adanya fasilitas pendukung dan potensi wisata yang disajikan dalam struktur kehidupan desa menampilkan nilai-nilai keaslian pedesaan baik kehidupan budaya, adat istiadat dan sosial. Peran penting keberhasilan pengembangan desa wisata dari masyarakat perlu memaksimalkan promosi sumber daya dan pembangunan berkelanjutan dengan menyadari kesejahteraan masyarakat sekitar untuk mengelola potensi desa dengan baik (Dwimahendrawan & Saputri, 2021).

Pariwisata akan berkembang baik jika pengembangan dan pembangunan pariwisata yang telah dilakukan mampu dipertahankan dan berkelanjutan, karena itu harus ditunjang dengan pemanfaatan daerah tujuan wisata. Adanya keterkaitan antara fasilitas, aksesibilitas serta masyarakat memungkinkan dalam perkembangan pariwisata. Modal dasar pariwisata dalam hal ini yaitu mempertahankan sosial ekonomi, budaya masyarakat maupun keberlanjutan alam dari berbagai pihak tanpa terkecuali sehingga ada komitmen bersama agar keberlanjutan pariwisata dilakukan bukan hanya diwacanakan.

Pariwisata konvensional tidak mampu menawarkan keunikan yang dimiliki oleh pariwisata di desa dimana pengembangannya dapat menampilkan yang lebih dinamis terkait variasi destinasi wisata. Dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi lingkungan guna kepentingan wisata agro, wisata spiritual, wisata tirta, wisata olahraga dan wisata budaya. Mengembangkan potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing desa wisata, terbinanya dan terpeliharanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat di desa, serta mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat desa merupakan bentuk tujuan dari adanya pembangunan desa wisata (Puspantari, 2022).

Masyarakat dapat menerima manfaat apabila potensi desa dikelola dengan baik bukan hanya ketersediaan sumber daya alam tetapi juga lingkungan, sumber daya manusia, sosial dan budaya desa. Sinergi positif perlu diwujudkan oleh peran berbagai pihak untuk mempercepat konstruksi peningkatan kesejahteraan desa. Konsep kesejahteraan desa dapat dirumuskan dengan memberikan ide atau gagasan melalui fasilitator baik peneliti maupun pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam memberikan

kontribusi berdasarkan kearifan lokal di daerahnya baik budaya maupun sejarah. Masyarakat dianggap lebih mengenal kebutuhan dan lingkungannya sehingga berperan penting dalam kesuksesan mewujudkan kesejahteraan desa, daripada pemerintah ataupun pihak ketiga (Sokarina, 2021).

Pengelolaan dalam berbagai kegiatan kepariwisataan melalui pemberdayaan masyarakat, menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pariwisata, sehingga masyarakat menerima sebesar-besarnya kemanfaatan kepariwisataan. Pembangunan dilakukan tidak hanya membangun dari segi fisik saja melainkan dari aspek segi non fisik juga. Masyarakat leluasa dalam mengelola wisata hasil dari swadaya, ada jangkauan dari pemerintah yang memberikan regulasi terkait pengelolaan. Mitra kerja sangat penting sebagai lembaga untuk menjalin kerjasama dalam pengelolaan pariwisata. Pengelolaan pariwisata yang perlu diperhatikan yakni perbaikan dan perawatan yang ada di dalamnya melingkupi masalah pengelolaan objek baik tata budaya masyarakat maupun tata alam, restorasi, transportasi dan akomodasi sebagai penginapan pengunjung.

Collaborative governance bisa digunakan sebagai desain baru dan langkah terbaik untuk pengembangan pariwisata pesisir di Kabupaten Pamekasan, Sumenep, Sampang dan Bangkalan sebab pemerintah daerah tidak memiliki cukup sumber daya untuk membuat infrastruktur dan fasilitas yang memadai, masyarakat Madura yang juga pasif dalam berpartisipasi. Diperlukan upaya strategis agar dapat mendekatkan diri kepada masyarakat melalui proses pengambilan keputusan kolaboratif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik (Yurizal & Aripin, 2022). Maka perlunya kerjasama antara

pemerintah, pihak swasta serta masyarakat dalam membangun dan mengelola pariwisata khususnya dalam pengembangan destinasi wisata pesisir.

Pelosok desa yang berada di Kabupaten Pamekasan belakangan ini banyak ditemukan dan dikembangkan objek pariwisata sesuai dengan program pemerintah yaitu desa tematik. Salah satu wisata yang berada di Pamekasan yaitu Pantai *The Legend* terletak di Desa Padelegan. Pantai *The Legend* yang namanya diambil dari perubahan nama Desa Padelegan ini diresmikan pada bulan April 2021. Pantai *The Legend* tersebut dinaungi oleh Pemerintah Desa Padelegan serta dikelola antaranya oleh Pemuda Ansor dan Bumdes Baruna Nusa Desa Padelegan. Pengunjung yang berkunjung ke pantai *The Legend* tersebut tidak hanya pengunjung yang berasal dari Pamekasan saja melainkan juga dari luar Madura.

Wisatawan tidak mengurungkan niat untuk tetap berkunjung ke Pantai *The Legend* di Pamekasan Madura karena pesona keindahan alamnya yang menarik walaupun objek wisata masih dikatakan belum sempurna dan masih tahap pembangunan serta pengembangan untuk melengkapi wahana di dalamnya. Pantai *The Legend* ini memiliki pemandangan yang memukau, hawa sejuk menyelimuti kawasan pantai serta pesona alam pantai yang indah memengaruhi keindahan pantai sebagai daerah tujuan pengunjung khususnya bagi masyarakat yang terdapat di sekitar pantai *The Legend* Padelegan Pademawu Pamekasan. Beberapa sempalan kayu berbagai macam bentuk tertancap kuat di atas hamparan pasir, tepat di antara pohon cemara yang menarik pengunjung untuk dijadikan spot foto yang sangat *instagramable*. Pengelola pantai telah melengkapi fasilitas wisata dengan gazebo, toilet, dan tempat sampah dengan tujuan agar kebersihan pantai tetap terjaga.

Pantai *The Legend* sebagai objek wisata yang cukup banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai wilayah tidak hanya berasal dari Pamekasan namun juga ada yang dari luar wilayah seperti Sumenep, Sampang, serta Bangkalan menjadikan salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Pamekasan. Pantai ini menjadi andalan untuk mengenalkan Padelegan kepada masyarakat luas sebab mempunyai daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Namun masih ada banyak fasilitas yang masih harus dipenuhi oleh pengelola pantai agar wisatawan merasa nyaman dan akses jalan masih harus diperhatikan mengingat masih banyaknya jalan yang berlubang, akses jalan juga hanya bisa dilewati dengan satu mobil saja.

Setelah melakukan observasi ada beberapa alasan peneliti memilih Pantai *The Legend* sebagai objek penelitian. Pertama, meskipun ada banyak pantai yang berada di Madura akan tetapi dalam hal pengelolaannya kebanyakan masih dikelola oleh Pemerintah Kabupaten atau dikelola oleh Swasta. Namun berbeda dengan Pantai *The Legend*, dimana pengelolaan dilakukan dibawah Pemerintah Desa secara langsung. ketika berada di bawah naungan pemerintah desa maka akan terkait dengan teori agensi secara lebih dekat antara Pemerintah Desa sebagai *agent* dan Masyarakat Desa sebagai *principal*. Kedua, karena ada ketimpangan antara teori dengan praktek yang berada di lapangan. Ketimpangan tersebut yakni pengelolaan keuangan yang masih belum jelas adanya dari segi bentuk laporan keuangan dan cara pelaporan oleh pengelola pantai kepada pemberi amanah yaitu BUMDes. Kemudian penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan objek wisata masih jarang dilakukan. Kebanyakan penelitian mengenai akuntabilitas

dan transparansi dilakukan pada objek seperti dana desa dan pengelolaan keuangan rumah ibadah.

Dengan begitu, maka judul penelitian ini adalah “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Pantai *The Legend*”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Akuntabilitas dalam pengelolaan Pantai *The Legend*?
2. Bagaimana Transparansi dalam pengelolaan Pantai *The Legend*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan Akuntabilitas dalam pengelolaan Pantai *The Legend*.
2. Mendeskripsikan Transparansi dalam pengelolaan Pantai *The Legend*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadi kebermanfaatan kepada masyarakat, tambahan memberikan pengetahuan dalam bidang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pariwisata, dan tentunya dapat menambah pengalaman diri sendiri.

1.4.2 Bagi Bidang Akademik

Bagi Bidang Akademik penelitian ini bisa menambah referensi mengenai Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan pariwisata.

1.4.3 Bagi Pengelola

Bagi pihak pengelola penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi sekaligus bahan evaluasi mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan yang terdapat di wisata Pantai *The Legend*.